

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iii-v
Abstrak.....	vii-xii

Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia oleh: <i>Lili Romli</i> .....	199-220
--	---------

Ancaman Keamanan Non-Konvensional di Pulau Terluar Indonesia: Kasus Kepulauan Morotai oleh: <i>Poltak Partogi Nainggolan</i> .....	221-248
--	---------

Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Birokrasi, di Indonesia oleh: <i>Riris Katharina</i> .....	249-270
---	---------

Konflik Ambon: Kajian Terhadap Beberapa Akar Permasalahan dan Solusinya oleh: <i>Debora Sanur Lindawaty</i> .....	271-297
---	---------

Implikasi Moratorium Penerimaan CPNS Terhadap Optimalisasi Reformasi Birokrasi oleh: <i>Dewi Sendhikasari Dharmaningtias</i> .....	299-322
--	---------

Konsep dan Regulasi TV Lokal dalam Kerangka Penguatan Budaya Lokal oleh: <i>Handrini Ardiyanti</i> .....	323-340
--	---------

Biodata Penulis dan Mitra Bestari

Pedoman Penulisan



## PENGANTAR REDAKSI

*Jurnal Politica* merupakan jurnal ilmiah yang konsisten untuk menyajikan berbagai permasalahan strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional yang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Edisi ketiga pada Tahun 2011 ini, *Jurnal Politica* menyajikan 6 (enam) tulisan yang merupakan hasil kajian di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional.

“Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia” adalah artikel pertama yang ditulis oleh Lili Romli. Indonesia pasca Orde Baru mengalami perubahan dalam penerapan sistem politik, dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis. Dengan diterapkan sistem demokratis memberikan perubahan terhadap dinamika kehidupan politik. Di antara perubahan yang terjadi adalah jaminan kebebasan berekspresi dan berasosiasi untuk mendirikan dan atau membentuk partai politik (parpol). Tidak seperti era sebelumnya, pada masa pasca Orde Baru ini yang disebut sebagai era reformasi, setiap kelompok atau golongan bebas membentuk dan mendirikan parpol serta tidak ada pembatasan jumlah partai politik. Dalam era reformasi ini, partai politik menjadi salah satu institusi yang penting. Partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan. Partai merupakan salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri. Tanpa ada partai politik maka demokrasi tidak akan bisa bekerja dan berjalan. Upaya agar partai politik berfungsi dengan baik, perlu dilakukan melalui penguatan kelembagaan partai politik agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan optimal. Dalam konteks tersebut, upaya penguatan *platform* partai, kaderisasi, rekrutmen politik, dan menciptakan kohesivitas internal partai, merupakan suatu keniscayaan yang mesti segera dilakukan oleh partai-partai politik.

Tulisan kedua berjudul “Ancaman Keamanan Non-Konvensional di Pulau-pulau Terluar Indonesia: Kepulauan Morotai” ditulis oleh Poltak Partogi Nainggolan. Pada edisi ini, penulis membahas peran penting Kepulauan Morotai sebagai pintu masuk ke dalam negara Indonesia dan ancaman konvensional yang

dihadapi pulau tersebut sebagai salah satu pulau di perbatasan negara. Potensi alamiah yang dimiliki, terutama kandungan sumber daya alam, pertambangan, perikanan dan letak geografis yang sangat strategis sebagai batu pijakan menuju Samudera Pasifik membuat keberadaan dan masa depan pulau-pulau itu sangat rawan dari ancaman penguasaan kedua macam aktor individual dan negara asing. Untuk membangun Pulau Morotai yang statusnya sudah dimekarkan sebagai kabupaten baru di Provinsi Maluku Utara, berbagai rencana strategis menyangkut bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pengembangan pertanian, perkebunan, dan industri rakyat dan lain-lain harus dibuat dengan seksama. Hanya dengan cara ini, taraf kesejahteraan rakyat Pulau Morotai dapat diperbaiki, dan ancaman keamanan terhadap keamanan manusia di sana dapat dilenyapkan. Pentingnya pembangunan Pulau Morotai secara menyeluruh sangat berkaitan dengan masa depan keutuhan NKRI. Sehingga, perhatian untuk pembangunan Pulau Morotai di segala sektor harus diberikan lebih besar lagi oleh pemerintah pusat.

Riris Katharina menjadi penulis ketiga dalam jurnal ini, menyajikan tulisan dengan judul “Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Birokrasi di Indonesia’. Kehadiran wakil menteri berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang ternyata menimbulkan masalah baru. Fenomena bertambahnya jumlah wakil menteri dan posisi wakil menteri sebagai pegawai karir dan bukan anggota kabinet namun diangkat oleh Presiden telah menimbulkan tafsir bahwa wakil menteri telah diintervensi oleh pejabat politik. Wakil menteri telah menimbulkan implikasi baru dalam birokrasi Indonesia. Kehadiran Wamen mau tidak mau telah membawa perubahan dalam memandang birokrasi Indonesia. Birokrasi Indonesia dapat dikatakan mulai dikendalikan lagi oleh politisi. Padahal, dalam banyak perkembangan birokrasi di negara-negara maju, birokrasi yang berada di bawah kendali politisi akan menjadi birokrasi yang tidak inovatif, sering berubah karena pergantian situasi politik, dan posisinya sangat bergantung kepada politisi. Tulisan ini berupaya menjelaskan posisi wakil menteri menurut UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ke depan, posisi wakil menteri direkomendasikan untuk diperjelas agar terjadi hubungan yang harmonis antara jabatan politik dan jabatan karir dalam birokrasi Indonesia.

Tulisan keempat adalah hasil pengkajian Debora Sanur Lindawaty dengan judul “Konflik Ambon:Kajian Terhadap Beberapa Akar Permasalahan dan Solusinya. Beberapa hal yang dibahas dalam tulisan ini adalah perjalanan konflik di Ambon hingga memunculkan konflik September 2011. Akar

konflik Ambon adalah ketidakadilan baik secara ekonomi politik maupun sosial budaya, sedangkan pemicu konflik yang paling cepat membakar adalah isu agama. Sehingga penyelesaian konflik juga harus komprehensif dengan menggunakan kebijakan lokal, salah satu contohnya istilah *baku bae* digunakan saat penyelesaian konflik ambon. Oleh sebab itu, tanggung jawab harmoni dalam masyarakat adalah tanggung jawab semua pihak, tokoh agama, tokoh politik, media dan akademisi. Namun demikian pemerintah tetap memiliki tanggung jawab yang lebih besar.

Tulisan kelima berjudul “Implikasi Moratorium Penerimaan CPNS Terhadap Optimalisasi Reformasi Birokrasi” dengan penulis Dewi Sendhikasari Dharmaningtiyas. Moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) telah ditetapkan pemerintah dalam rangka penghematan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Dengan adanya kebijakan moratorium penerimaan CPNS diharapkan pemerintah dapat menata ulang organisasi dan sistem kepegawaian Indonesia serta dapat melakukan penghematan anggaran belanja pegawai yang semakin meningkat. Pemerintah pusat wajib mengawasi langkah-langkah yang ditempuh selama pelaksanaan kebijakan moratorium tersebut baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama dalam penataan organisasi dan PNS sehingga dapat dinilai apakah kebijakan tersebut masih perlu dilanjutkan atau tidak untuk mencapai tujuan dari reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur. Pemerintah pusat juga perlu segera merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan birokrasi dan kepegawaian, salah satunya yaitu RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan mampu memperbaiki sistem kepegawaian di Indonesia.

“Konsep dan regulasi TV Lokal Dalam Kerangka Penguatan Budaya Lokal” menjadi tulisan terakhir dalam jurnal ini ditulis oleh Handrini Ardiyanti. Televisi lokal memiliki peranan sangat penting dalam mengelola perubahan budaya bangsa, sebab TV lokal merupakan representasi identitas dan eksistensi budaya lokal. Namun di sisi lain televisi lokal juga berkembang dengan format yang tidak jauh berbeda dengan televisi komersial lainnya. Oleh karena itu, perlu pengaturan yang lebih jelas tentang konsep dan regulasi televisi lokal yang dapat mendukung penguatan budaya lokal. Sistem pertelevisian Indonesia yang menempatkan televisi lokal dalam dua dikotomi yaitu sebagai lembaga penyiaran swasta dan sekaligus sebagai lembaga penyiaran publik menyebabkan televisi lokal tidak mampu secara penuh hadir sebagai kekuatan penyeimbang serbuan budaya global yang menggerus budaya lokal Indonesia. Guna menjamin kelangsungan hidup industri televisi lokal dalam konteks persaingan bisnis

media diperlukan sebuah bauran strategi program, keberpihakan dari para penyusun regulasi dalam bentuk konkrit, dan suatu sistem penyiaran nasional yang memiliki batas-batas wilayah siaran yang tegas guna menghindari tumpang tindih siaran.

Pada tataran konseptual, tulisan-tulisan dalam Jurnal ini diharapkan dapat menjembatani interaksi berbagai konsep dan teori dengan realitas yang terkait dengan masalah di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas keilmuan. Sedangkan pada tataran praktis, berbagai masalah, data, konsep dan teori serta analisis dalam tulisan-tulisan di Jurnal ini, diharapkan mampu menjadi referensi pelengkap bagi Anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta kepada masyarakat pada umumnya. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada DR. Lili Romli, M.Si., peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI dan DR. Ganewati Wuryandari, MA, Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sebagai Mitra Bestari, atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam edisi ketiga *Jurnal Politica* ini.

Jakarta, Oktober 2011

Redaksi

Kata kunci bersumber dari artikel.  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Romli, Lili

Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia

Pada era reformasi ini, partai politik menghadapi persoalan terkait dengan pelebagaan partai. Umumnya, partai-partai politik menghadapi persoalan pelebagaan partai yang belum kuat, yaitu masalah ideologi dan platform, kohesivitas dan manajemen konflik, serta rekrutmen dan kaderisasi. Selain itu, sistem kepartaian yang ada ternyata belum kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial sehingga pemerintahan tidak berjalan efektif.

Kata Kunci: Sistem kepartaian, pelebagaan partai politik, dan *electoral threshold*.

Romli, Lili

*Parties Reform and Party System in Indonesia*

*In this reform era, political parties face questions on institutionalization. Generally, political parties deal with weak institutionalization such as the problems of ideology and platform, cohesiveness and conflict management, as well as their recruitment and cadre system. In addition to this, the existing party system is not compatible with the presidential system so that the elected government could not be effective.*

*Keywords: Party system, parties institutionalization, and electoral threshold.*

Kata kunci bersumber dari artikel.  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Nainggolan, Poltak Partogi

Ancaman Keamanan Non-Konvensional di Pulau Terluar Indonesia: Kasus Kepulauan Morotai

Pulau-pulau terluar Indonesia selama ini kurang memperoleh perhatian pemerintah pusat, padahal kondisinya rawan dari ancaman pihak asing. Laporan penelitian lapangan ini memetakan berbagai jenis ancaman keamanan yang dihadapi pagar terdepan NKRI yang sangat strategis di Samudera Pasifik, yaitu Morotai. Dengan memadukan *library study* dan *in-depth interview*, penelitian ini mengungkapkan jenis-jenis ancaman keamanan non-tradisional di sana, selain ancaman keamanan utama. Analisis yang menggunakan metode kualitatif ini menjelaskan kondisi Kabupaten Kepulauan Morotai yang sangat rawan dari berbagai bentuk ancaman keamanan yang ada, terutama non-tradisional, sekalipun ia telah dimekarkan sebagai sebuah kabupaten baru.

Kata Kunci: Ancaman keamanan, keamanan nonkonvensional, keamanan *non-tradisional*, *non-traditional threats*, pulau terluar, Morotai

Nainggolan, Poltak Partogi

Non-Conventional Security Threats in Ocean Islands: The Case of Morotai

*Remote and outer Islands of Indonesia still have not been properly taken care by the central government although they recently confronted crucial threats from other countries. This field research attempted to disclose potential threats in Morotai, an Indonesian strategic island in the Pacific Ocean. Applying a combination of approaches, library study and in-depth interview, the research describes not only main (conventional) security threats, but also non-conventional ones. Its analysis which uses a qualitative method has explained the recent situation in the Municipality of the Morotai Archipelago. The research finding explains how serious the conventional security threats in Morotai as a newly enlarged municipality.*

*Keywords: Security threat, non-conventional security, non-traditional security, non-traditional threat, outer islands, Morotai.*

Kata kunci bersumber dari artikel.  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Katharina, Riris

Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya terhadap Birokrasi di Indonesia

Kehadiran wakil menteri berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ternyata menimbulkan masalah baru. Fenomena bertambahnya jumlah wakil menteri dan posisi wakil menteri sebagai pegawai karir dan bukan anggota kabinet namun diangkat oleh Presiden telah menimbulkan tafsir bahwa wakil menteri diintervensi oleh pejabat politik. Wakil menteri telah menimbulkan implikasi baru dalam birokrasi Indonesia. Tulisan ini berupaya menjelaskan posisi wakil menteri menurut UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ke depan, posisi wakil menteri direkomendasikan untuk diperjelas agar terjadi hubungan yang harmonis antara jabatan politik dan jabatan karir dalam birokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Wakil menteri, administrasi negara, birokrasi.

Katharina, Riris

Vice Ministers and Its Impacts on Bureaucracy in Indonesia

*The position of the vice ministers stipulated in Law Number 39 Year 2008 on The State Ministry raises a new problem. Phenomena such as the increasing of number of the vice ministers and the position of the vice ministers as career official but not part of cabinet but appointed by the President have been linked to their position as political appointee. The position of the vice ministers gives impact on bureaucracy in Indonesia. Focusing on the position of the vice ministers according to the law and its impact to bureaucracy, this paper recommends that the position of vice ministers in the future must be clear whether as political official or career official.*

*Keywords: Vice ministers, public administration, bureaucracy.*

Kata kunci bersumber dari artikel.  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Lindawaty, Debora Sanur

Konflik Ambon: Kajian terhadap Beberapa Akar Permasalahan dan solusinya

Penulisan ini bertujuan untuk melihat beberapa akar permasalahan konflik Ambon dan solusinya. Beberapa hal yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah tentang perjalanan konflik di Ambon hingga memunculkan konflik September 2011 ini. Peran aparat dalam menjaga keamanan di daerah Ambon, dan solusi untuk mengatasi konflik Ambon pada masa yang akan datang. Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yang bercorak deskriptif analisis.

Kata Kunci: Konflik Ambon, TNI, Polri

Lindawaty, Debora Sanur

Ambon Conflict: an Analysis on some Roots of Recent Conflict and Its Solution

*This paper aims to look at some roots of Ambon recent conflict and its solution. It discusses the background of the communal conflict which emerged in September 2011. It also discusses the role of security in resolving and preventing the re-emergence of new conflict in the future. This analysis uses a qualitative approach and presents explanations descriptive.*

*Keywords: Conflict Ambon, TNI, Polri*

Kata kunci bersumber dari artikel.  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Dharmaningtias, Dewi Sendhikasari

Implikasi Moratorium Penerimaan CPNS terhadap Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Moratorium penerimaan pegawai baru (CPNS) telah ditetapkan pemerintah dalam rangka penghematan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Kebijakan pengelolaan SDM aparatur dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan dalam *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi. Tulisan ini untuk menganalisis langkah-langkah dan implikasi yang dilakukan pemerintah dalam menata ulang organisasi PNS dengan mengeluarkan kebijakan moratorium tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, selain bertujuan untuk penghematan anggaran belanja pegawai, juga harus dijadikan upaya penataan organisasi dan PNS dalam rangka optimalisasi agenda reformasi birokrasi terutama bidang SDM aparatur di Indonesia.

Kata Kunci: Moratorium, Pegawai Negeri Sipil, Reformasi Birokrasi

Dharmaningtias, Dewi Sendhikasari

Moratorium of CPNS Recruitment and Its Impacts on Bureaucratic Reform

*Moratorium of new recruitment of civil servant (CPNS) has been set by the government in the framework of budget savings and improving management of human resources (HR). The HR policies is carried out under the direction of policy in the grand design and road map of the national bureaucratic reforms. The aims of this article to analyze steps and the implications taken by the government in managing the re-organization of PNS and Its staff by issuing the moratorium policy. This policy, in addition to cut personnel expenditure budget, is also intended to restructure civil servants and their organization in order to optimize the bureaucratic reform agenda.*

*Keywords: Moratorium Policy, civil servant, bureaucratic reform.*

Kata kunci bersumber dari artikel.  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Ardiyanti, Handrini

Konsep dan Regulasi TV Lokal dalam Kerangka Penguatan Budaya Lokal

Televisi lokal memiliki peranan sangat penting dalam mengelola perubahan budaya bangsa, sebab TV lokal merupakan representasi identitas dan eksistensi budaya lokal. Namun, disisi lain, televisi lokal juga berkembang dengan format yang tidak jauh berbeda dengan televisi komersial lainnya. Oleh karena itu, perlu pengaturan yang lebih jelas tentang konsep dan regulasi televisi lokal yang dapat mendukung penguatan budaya lokal.

Kata kunci: Televisi lokal, penyiaran, regulasi, dan budaya lokal

*Ardiyanti, Handrini*

*Concept and Regulation of Local TVs in the Framework of Strengthening Local Culture*

*Local television have an important roles in maintaining local culture, but in reality, their format have no different from other commercial television which are more like to show the global culture. Therefore, this paper attempted to answer questions about how the broadcasting regulation influences local television. In its conclusion, this paper explains how local television should be established as public broadcasting so they can strengthen the local culture through their programs.*

*Keywords: Local television, broadcasting, regulation, local culture*